

Pendapatan Asli Daerah - Bapenda Makassar Target PAD 2024 Rp1,9 Triliun



Sumber Gambar:

<https://makassar.antaranews.com/berita/529203/bapenda-makassar-target-pad-2024-rp19-triliun>

Pemerintah Kota melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Sulawesi Selatan menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun ini sebesar Rp1,9 triliun atau melampaui pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp1,5 triliun lebih.

“Kita menargetkan PAD ini tahun 2024 di angka Rp1,9 triliun,” kata Kepala Bapenda Makassar Firman Hamid Pagarra saat dikonfirmasi, di Makassar, Kamis.

Sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kata dia, sesuai dengan visi misi Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto sebesar Rp2 triliun.

“Target menuju PAD untuk Rp2 triliun itu sesuai dengan visi misi pak Wali di RPJMD tahun 2021 sampai tahun 2026,” ujarnya menegaskan.

Pada kesempatan lain dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) lalu di Hotel The Stone Bali, kata Firman, PAD menjadi satu kesatuan dalam pembiayaan belanja daerah yang telah masuk dalam Program APBD Kota Makassar.

Selain itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD dengan melakukan intensifikasi pemungutan dan ekstentifikasi sumber PAD sehingga target penerimaan bisa tercapai.

“Kita patut bersyukur PAD tahun 2023 telah mencapai Rp1,5 triliun. Capaian ini memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah Pemkot Makassar. Keberhasilan ini didorong

inovasi OPD termasuk Bapenda sebagai pengelola Pajak Daerah melalui aplikasi PAKINTA,” tuturnya.

Melalui Rakorsus ini, kata Firman yang diamanahkan menjadi Pejabat (Pj) Sekretariat Daerah Makassar menekankan, OPD dan BUMM terus membangun sinergisitas dan kolaborasi guna menggali potensi untuk optimalisasi menuju PAD Rp2 triliun tahun 2024.

Selain itu, sesuai amanah Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Kota Makassar telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebelumnya, Sekretaris Bapenda Kota Makassar Muh Fua Arfandi dalam pemaparannya pada Rakorsus Bapenda 2024 bertema ‘Low Carbon City dengan Metaverse’ di Hotel Fourpoint by Sheraton Senin (26/02) menyebut realisasi PAD dari 2014-2023 mengalami peningkatan dan pada tahun 2023 telah menembus Rp1,5 triliun.

Peningkatan pendapatan tersebut di era kepemimpinan Moh Ramdhan Pomanto terus tumbuh baik melalui kanal digitalisasi seperti Qris, dan E-commerce pada pajak daerah sebesar 269,24 persen dan penggunaan aplikasi pajak PAKINTA mencapai 139,52 persen.

Khusus untuk pajak, PAD berhasil dicapai sebesar Rp1,170 triliun, sementara sisanya diperoleh dari retribusi daerah. Sedangkan pengawasannya melalui CCTV serta penggunaan alat rekam transaksi online (TMD dan Mpost) kepada wajib pajak, begitu pula penindakan kepada wajib pajak yang menunggak atau memiliki piutang pajak.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto saat menutup Rakorsus tersebut melalui Zoom mengungkapkan posisi terakhir PAD berada di angka Rp1,5 triliun tahun 2023. Ini sebuah pencapaian yang sudah cukup profesional tetapi masih ada PR yang harus diwujudkan kedepannya.

Khusus 2024, tentunya dengan target Rp2 triliun itu sebuah target yang harus membutuhkan kerja-kerja detail di setiap OPD pendapatan atau retribusi di lingkup Pemkot Makassar.

Tak hanya itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke 15 kecamatan di Kota Makassar.

SPPT PBB ini selanjutnya akan dikirimkan ke masing-masing wajib pajak agar pembayaran bisa dilakukan tepat waktu. Ini agar serapan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini semakin maksimal.

Kepala UPT PBB, Indirwan Dermayasair mengatakan, “Penyampaian SPPT PBB itu langsung diberikan pada para wajib pajak yang bersangkutan melalui unsur kewilayahan”.

Bapenda turut menggandeng camat dan lurah setempat sehingga penyampaian SPPT PBB dapat semakin efisien dan lebih cepat waktu. Diharapkan kecepatan dan ketepatan dalam penyampaian SPPT PBB itu bisa memberikan dampak yang baik.

Dengan pembayaran tepat waktu dan meningkatnya ketertiban dalam pelunasan pajak, pihaknya optimistis target penerimaan PBB yang mencapai Rp 320 miliar bisa tercapai pada akhir tahun ini.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.antarane.ws.com/berita/529203/bapenda-makassar-target-pad-2024-rp-19-triliun> 1 Maret 2024;
2. <https://bapenda.makassarkota.go.id/2024/03/07/pembagian-sppt-pbb-di-kecamatan/> 5 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.